BPPM MAHKAMAH FAKULTAS HUKUM UGM

mahkamah

Edisi ke 24/XXIII/V/2013

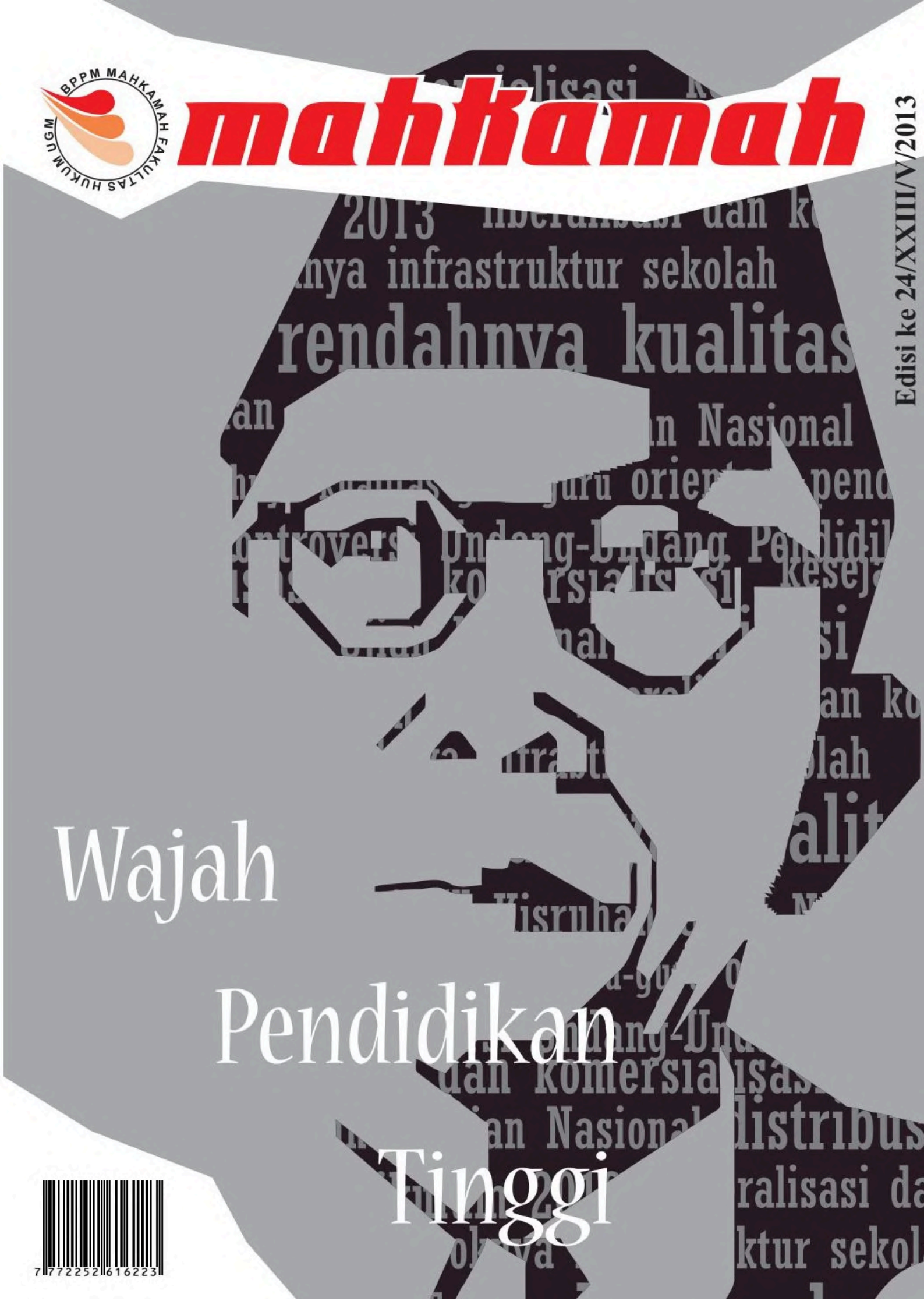

7 772252 616223

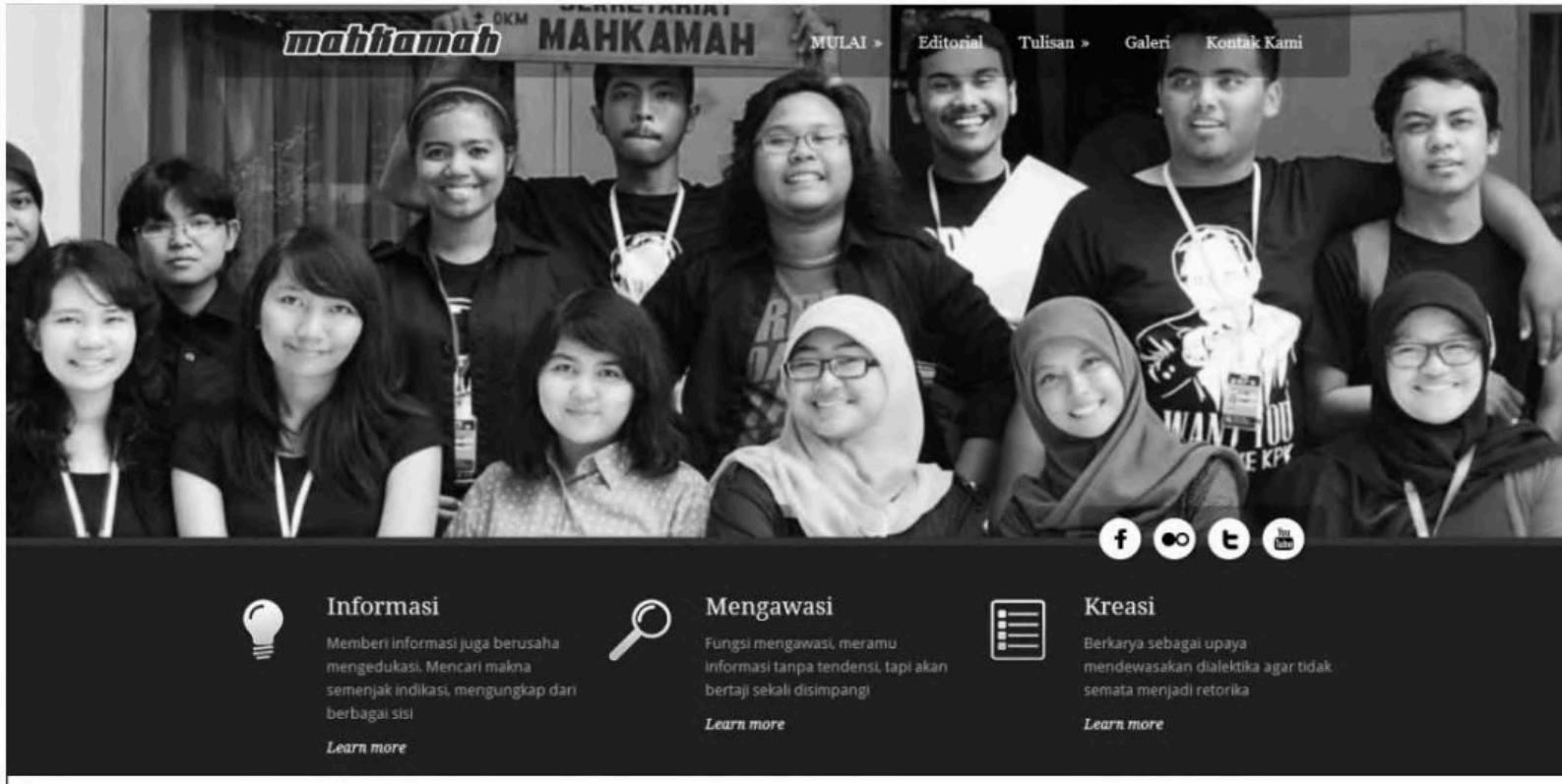

BPPM MAHKAMAH FAKULTAS HUKUM UGM

kunjungi

mahkamahnews.org

INFORMASI

Memberi informasi juga berusaha mengedukasi. Mencari makna semenjak indikasi, mengungkap dari berbagai sisi

MENGAWASI

Fungsi mengawasi, meramu informasi tanpa tendensi, tapi akan bertaji sekali disimpangi

KREASI

Berkarya sebagai upaya mendewasakan dialektika agar tidak semata menjadi retorika

DARI REDAKSI

Buletin ini adalah sedikit sumbangan ide dan pemikiran yang kami persembahkan untuk pendidikan bangsa dan negara ini.

Salam Persma untuk semua pembaca Buletin Mahkamah.

Buletin Mahkamah ini merupakan buletin pertama di era kepengurusan Mahkamah Tahun 2013. Buletin edisi kali ini mengambil tema tentang pendidikan. Sebuah tema klise yang sudah berkali-kali dibicarakan baik oleh berbagai media, diskusi, maupun pemberitaan lainnya, namun tetap saja masih menjadi isu hangat di negara ini.

Sejatinya pendidikan merupakan sebuah hak setiap warga negara yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Dalam artian, pendidikan merupakan sebuah hak yang melekat dalam diri setiap warga negara Indonesia. Konstitusi kita telah berikrar bahwa salah satu tujuan negara adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu bentuk realisasi tujuan tersebut adalah dengan menciptakan sistem pendidikan yang mampu mencakup dan merangkul seluruh warga negara. Perbaikan kualitas dan pemerataan pendidikan menjadi kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara negara. Namun, berbagai permasalahan tentang pendidikan masih saja menjadi rintangan yang tak kunjung mendapatkan pemecahannya. Sebut saja permasalahan biaya pendidikan, akses masuk perguruan tinggi sampai dengan pro-kontra berubahnya status perguruan tinggi menjadi sebuah barikade permasalahan yang susah untuk ditembus. Menjadi pertanyaan, apakah pemerintah mampu memberikan pemecahan berbagai masalah ini?

Kami menyadari bahwa dalam penerbitan buletin ini masih banyak berbagai kekurangan. Kami mohon maaf atas berbagai kekurangan tersebut. Segala bentuk kritik dan saran akan kami terima dengan terbuka sebagai jalan bagi kami untuk terus berbenah diri.

Akhir kata, semoga buletin ini menjadi salah satu sumber bacaan yang mampu membuka pemikiran kita yang masih tersimpan untuk disampaikan kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Selamat membaca dan berimajinasi!(***)

-redaksi-

SUSUNAN PENGURUS

Pelindung: Tuhan Yang Maha Esa
Dewan Penasehat: Jeremias Lemek, S.H.
Zainal Arifin M, S.H.,LL.M.
Wakil Dekan
Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Hukum UGM :
Prof. M. Hawin. S.H. LL.M. Ph.D

DIVISI UMUM
Pemimpin Umum: Abraham Adi
Sekretaris Umum: Evi
Bendahara Umum: Riva

DIVISI REDAKSI
Pemimpin Redaksi: Erdha Widianto
Redaktur Pelaksana : Pratiwi, Tiffa
Redaktur Kampus : Ahmad Halim Pradana
Redaktur Koran Tempel: Erdha Widayanto
Redaktur Mading: Arifani Faizal
Redaktur Blog: Chandra Purnama Putra
Staff Redaksi:
Kohar, Pulkeria, Dian
Paramita, Ishmatul Luluk.

DIVISI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Kepala Litbang: Moses Parlidungan
Kasubdiv Riset&Diskusi: Lusi Yolanda
Kasubdiv PSDM: Fransisca F.R.C
Staf Litbang: Benedictus Wisnu, Yohanes Aditya, Pramudana Gian

DIVISI PERUSAHAAN
Pimpinan Perusahaan: Mohamad Nurdin
Kasubdiv Marketing: Flossie
Kasubdiv PPD: Diyah Wara
Kasubdiv MDF: PitraStaf Perusahaan : Reta, Rini, Tiva

TENTANG SAMPUL

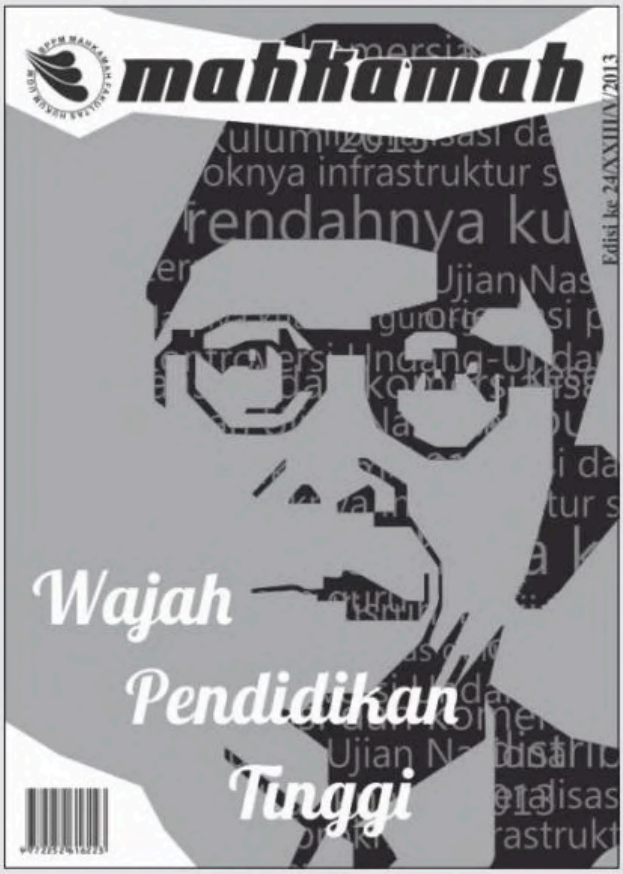

Rasanya tidak berlebihan untuk menjadikan Ki Hadjar Dewantara sebagai representasi niatan mulia pendidikan nasional. Tapi, perkembangan pendidikan nasional belum semulia niatan tersebut, sampul ini mencoba mendeskripsikan wajah pendidikan nasional dari salah satu bagiannya: pendidikan tinggi.

Jalan Sosio Yustisia No.1
Bulaksumur Yogyakarta
(0274) 901280, 901284

DAFTAR ISI

Editorial 1

Laporan Utama 3

Laporan Khusus 9

Laporan Utama 13

Parameter 22

Seputar kampus 19

Ius Constituendum 26

Sosok 30

Resensi 34

Sastra 38

Wajah Pendidikan Tinggi Negeri Terjajah

Oleh Erdha Widayanto

Tidak ada manusia yang menyembah pendidikan mendapatkan hasil terbaik dalam pendidikan. Tidak ada pendidikan manusia yang sempurna tanpa melawan pendidikan.

G.K. Chesterton

Menarik untuk selalu membicarakan dan menyibak pendidikan di negara ini. Beratus tahun rakyat bangsa ini menjadi babu bagi mereka para penjajah yang terdidik. Pada saat itu rakyat bangsa ini dipaksa memeras keringat dan tenaga, sementara ide dan pemikiran mereka terpasung oleh kekuasaan yang melarangnya untuk menjadi seorang yang terdidik. Alhasil, beratus tahun pula bangsa ini menjadi bangsa terbelakang diantara bangsa-bangsa yang membanggakan peradaban pendidikannya.

Pada masa itu, rakyat bangsa ini mengalami fase di mana perbudakan mencakup segala aspek kehidupan, termasuk dalam hak untuk mengenyam pendidikan. Tidak semua rakyat bangsa ini mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak. Jangankan mengenyam pendidikan yang layak, sekedar untuk membaca dan menulis pun rakyat bangsa ini membutuhkan waktu bertahun-tahun lamanya. Hanya segelintir orang saja yang mempunyai kesempatan untuk merasakan bagaiamana rasanya menggoreskan pensil di atas kertas dan mengucapkan lafal bahasa penjajah dengan benar. Selebihnya, sebagian besar rakyat pada masa itu hanya bisa berharap untuk tetap bertahan hidup di tengah arus eksploitasi penjajahan.

Mereka yang mengenyam pendidikan nyatanya mempunyai kesempatan yang besar untuk memimpin bangsa ini. Sebut saja tokoh seperti Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, Agus Salim dan tokoh pergerakan nasional lainnya. Para tokoh tersebut tidak akan pernah menjadi pemimpin yang mampu memerdekakan bangsa tanpa memperoleh berkah dari sinar pendidikan. Dengan kata lain, pendidikan membuka cakrawala dan kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Adalah bangku pendidikan tinggi yang kini banyak digadang oleh orang-orang sebagai pintu gerbang meraih kesuksesan. Pada dasarnya, pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan yang notabene berorientasi pada penerapan ilmu-ilmu dalam kehidupan nyata. Nantinya, mereka yang mengenyam bangku pendidikan tinggi diharapkan akan menjadi pionir dalam membangun bangsa dan negara

ini.

Namun, masih belum hilang dalam benak kita bagaimana beberapa waktu yang lalu pendidikan tinggi di Indonesia menuai banyak sorotan. Permasalahan tersebut muncul ketika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang Pendidikan Tinggi (UU PT). Sebelumnya, ketika masih menjadi wacana, draft Rancangan Undang-Undang (RUU) ini pun sudah mendapatkan banyak kritikan tajam baik itu dari kalangan akademisi maupun masyarakat biasa. Sorotan paling tajam terlihat dari masalah pendanaan dan otonomi perguruan tinggi. Dari segi pendanaan perguruan tinggi, seharusnya berpegang pada prinsip nirlaba, akuntabilitas dan transparansi. Dalam hal ini, pemerintah seolah ingin melepaskan tangan dalam hal pendanaan pendidikan tinggi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa anggaran pendidikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) belum mampu menciptakan pendidikan yang merata di Indonesia, termasuk pemerataan pendidikan tinggi. Hal ini berimbas dengan munculnya persaingan antar perguruan tinggi untuk mendapatkan dana segar dalam rangka penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pada masa pra-Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang kini sudah beralih menjadi Badan Layanan Umum (BLU) kompetisi pencarian dana tersebut setidaknya terlihat dari polemik penerapan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Lebih dari itu, banyak kalangan menilai bahwa otonomi perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi telah mendapat campur tangan pihak-pihak yang mengusung kepentingan. Hal ini dikhawatirkan bahwa otonomi perguruan tinggi akan menyimpang dari Tri Dharma perguruan tinggi itu sendiri.

Pendidikan tinggi ternyata juga belum mampu dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Dari jumlah penduduk yang berkisar diangka 200 jutaan, hanya sekitar 4,3 juta orang yang berstatus sebagi mahasiswa. Hal ini menjadi ironi tersendiri bagi pemerataan pendidikan di Indonesia. Pendidikan tinggi yang katanya dapat membuka cakrawala dan wawasan setiap orang, nyatanya hanya bisa didapatakan oleh sebagian orang saja. Padahal, bukankah mengenyam pendidikan, termasuk pendidikan tinggi merupakan hak setiap warga negara?

Negara sebagai pihak penyelenggara pendidikan tinggi mempunyai kewajiban yang besar untuk mewujudkan pendidikan tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali. Sejarah telah mencatat bahwa negara pernah berikrar bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tujuan negara. Mungkin masih banyak permasalahan mengapa pendidikan tinggi masih saja belum mampu dienyam oleh seluruh rakyat. Namun, hal itu bukan berarti bahwa pendidikan jauh dari mereka yang belum mampu dan belum pernah merasakan belajar di bangku pendidikan tinggi. Sudah seharusnya tujuan negara tersebut menjadi tujuan seluruh bangsa Indonesia. Jangan sampai rakyat bangsa ini kembali pada ingatan penjajahan yang memasung ide dan pemikiran mereka. Sudah saatnya pendidikan tinggi membawa rakyat bangsa ini ke dalam taraf kehidupan yang setinggi-tingginya.

Apa Kabar SNMPTN?

Oleh
Fransisca Riani Chandra, Sativa Koeswojo & Sekar Banjaran Aji

Serangkaian seleksi penerimaan mahasiswa baru sudah dibuka pada tanggal 23 Februari 2013 lalu. Dimulai dengan pelaksanaan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dengan penyerahan nilai rapot siswa-siswi SMA/SMK yang direkomendasikan oleh sekolah masing-masing. Kemudian akan dilanjutkan SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri) berupa ujian tulis yang rencananya akan diadakan pada tanggal 18-19 Juni 2013 dan untuk Universitas Gadjah Mada (UGM) dan beberapa perguruan tinggi negeri akan diadakan seleksi mandiri. Bobot prosentase pada masing-masing jalur seleksi penerimaan di UGM, menurut Wijayanti, kepala bidang humas UGM, yaitu sebesar 50% dari jumlah keseluruhan atau sebesar 3318 calon mahasiswa baru diterima melalui SNMPTN, 30% dari jumlah keseluruhan atau sebesar 1997 calon mahasiswa baru diterima melalui SBMPTN dan 20% dari jumlah keseluruhan atau sebesar 1331 calon mahasiswa baru diterima melalui seleksi mandiri.

Tiga jalur seleksi yang diberlakukan di UGM seperti disebutkan sebelumnya meliputi SNMPTN, SBMPTN dan seleksi mandiri. SNMPTN dipakai untuk menyebut yang dikenal sebagai SNMPTN Undangan pada pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun lalu. Tahun ini biaya pendaftaran SNMPTN jalur ini digratiskan karena didukung penuh oleh pemerintah. Prosedur seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui jalur ini yaitu semua berkas terutama nilai rapor siswa-siswi calon mahasiswa baru diserahkan ke perguruan tinggi

negeri yang dituju atau dalam hal ini UGM, kemudian akan diproses dengan suatu sistem dan rumusan tertentu yang kemudian akan menyaring lulusan-lulusan terbaik untuk menjadi mahasiswa UGM. SBMPTN diadakan oleh majelis rektor seluruh PTN bukan dari pemerintah, sehingga dibebankan biaya pendaftaran kepada peserta seleksi penerimaan jalur ini. Demikian juga dengan seleksi mandiri yang biaya pendaftarannya tidak digratiskan. Seleksi mandiri ini juga mencakup penjaringan bibit unggul dan ujian tulis. Penelusuran bibit unggul terdiri dari Penelusuran Bibit Unggul Tidak Mampu (PBUTM) , Penelusuran Bibit Unggul Berprestasi (PBUB), Penelusuran Bakat Olahraga dan Seni (PBOS) dan Penelusuran Bibit Unggul Kemitraan (PBUK). (metrotvnews.com)

Seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun lalu dibagi menjadi dua jalur yaitu SNMPTN Undangan dan SNMPTN Tulis. SNMPTN Undangan dilaksanakan pada 10 sampai 31 Mei 2012 sementara jalur SNMPTN tulis diadakan pada 12 dan 13 Juni 2012. Kemudian sebagian perguruan tinggi negeri yang masih merasa kurang dapat menyelenggarakan ujian mandiri setelah kedua jalur masuk yang ditentukan pemerintah di atas, namun dalam hal ini UGM tidak menyelengarakannya. UGM beralasan bahwa penjaringan secara mandiri masih belum efektif jika diadakan diakhir setelah SNMPTN Undangan dan SNMPTN tertulis. Namun ternyata setelah hal tersebut dilakukan masih banyak putra-putra terbaik daerah yang belum berkesempatan kuliah di UGM. Hal tersebutlah yang membuat UGM merubah tatanan cara masuk untuk tahun ini.

Dasar hukum penyelenggaraan SNMPTN ini dapat dalam Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010, Permendiknas No. 34 Tahun 2010, dan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU PT). Tata pelaksanaan seleksi masuk PTN tahun ini mengikuti aturan dalam Permendiknas No. 34 Tahun 2010.

Dalam peraturan tersebut PTN harus menerima paling sedikit 60% mahasiswa baru melalui Jalur Seleksi Nasional, PTN dapat menerima paling banyak 40% melalui jalur Seleksi Mandiri. PTN juga harus mengikuti aturan dalam UU PT yaitu penerimaan mahasiswa baru PTN untuk setiap program studi dapat dilakukan melalui pola penerimaan mahasiswa secara nasional atau bentuk lain. Dalam hal ini, pemerintah menanggung biaya calon mahasiswa yang akan mengikuti pola penerimaan mahasiswa baru secara nasional.

Seleksi penerimaan mahasiswa baru PTN tahun ini bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya memiliki beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Misalnya ketika diadakan penelitian, ternyata SNMPTN pada jaman ketika jalur seleksi mandiri diletakkan di awal dari seluruh rangkaian seleksi penerimaan mahasiswa baru, terbukti menjaring mahasiswa-mahasiswi yang lebih berkualitas daripada ketika seleksi mandiri dilaksanakan di akhir rangkaian jalur SNMPTN. Namun, SNMPTN dengan sistem seleksi mandiri diakhir rangkaian jalur SNMPTN seperti tahun 2013 ini diharapkan dapat lebih efektif mencerdaskan anak bangsa dengan menjaring mereka yang memiliki kemampuan terbatas atau terpusat pada bidang-bidang tertentu saja seperti fisika atau seni juga memberikan tempat lebih luas bagi para putra daerah.

Kemudian diadakannya SNMPTN Undangan atau yang dulu dikenal dengan PMDK dan sekarang dikenal sebagai SNMPTN, memperhatikan juga akreditasi dan rekam jejak sekolah serta Indeks Prestasi (IP) alumni sekolah itu, namun tetap saja yang diutamakan adalah nilai rapot yang bisa direkayasa. Akreditasi sekolah sendiri tidak bisa sepenuhnya diandalkan mengingat penilaian akreditasi sendiri tidak memiliki standar baku yang jelas. Belum tentu sekolah yang akreditasinya baik menjamin kualitas sekolah tersebut juga baik. Belum tentu juga akreditasi antara dua atau lebih

sekolah yang sama menunjukkan kualitas sekolah tersebut setara. Belum tentu juga di sekolah yang akreditasinya buruk berarti tidak ada siswa-siswinya yang memiliki kecerdasan yang pantas diapresiasi. Namun, justru SNMPTN Undangan yang memperbesar lahan kecurangan ini justru didukung oleh pemerintah.Hal ini terbukti dengan digratiskannya biaya pendaftaran SNMPTN Undangan tahun ini serta diperbanyaknya jumlah kursi untuk jalur undangan tanpa adanya pengawasan yang ketat atau solusi untuk mengurangi kecurangan beberapa sekolah yang menaikkan nilai rapot anak-anak didiknya agar bisa diterima di universitas negeri favorit. SNMPTN jenis ini juga memperbesar resiko persaingan tidak sehat di antara siswa-siswi sekolah dengan mengandalkan segala cara termasuk mencontek atau kecurangan lain demi mendapatkan jatah rekomendasi SNMPTN undangan tersebut.

Kemudian biaya kuliah yang rencananya menggunakan Uang Kuliah Tunggal (UKT), semua biaya pada awal masuk akan setara besarnya kecuali bagi calon mahasiswa yang kurang mampu. Di SNMPTN tahun-tahun sebelumnya ada perbedaan jenjang biaya yang menciptakan persepsi bahwa yang membayar biaya masuk lebih besar akan mempunyai kesempatan lebih besar untuk mendapat kursi di PTN daripada mereka yang membayar biaya rendah padahal kemampuannya lebih baik. Dalam hal ini sistem transparansi yang menurut Permendiknas No. 34 Tahun 2010 Pasal 2 huruf b bahwa transparansi hanya mencakup pada pendaftaran, seleksi, dan pengumuman, serta jumlah mahasiswa baru yang diterima sesuai dengan daya tampung setiap program studi sebaiknya diperluas lagi dengan keterbukaan akan nilai yang diperoleh dari hasil tes peserta seleksi masuk PTN. Karena sistem yang sekarang masih menciptakan persepsi bahwa yang pintar dan kemampuannya baik justru tidak diterima namun yang kemampuannya kurang malah dapat diterima karena membayar lebih

tinggi. Apabila akses publik terhadap hasil seleksi berupa nilai dapat dipenuhi, diharapkan akan mengurangi praktek kecurangan dan menghilangkan stigma bahwa calon mahasiswa yang membayar lebih tinggi akan memiliki kesempatan yang lebih besar. Dengan demikian selain membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaran seleksi itu sendiri, maka transparansi nilai hasil tersebut juga dapat memotivasi masyarakat kurang mampu agar tidak takut mendaftar ke PTN.

Sebenarnya keterbukaan mengenai hasil SNMPTN undangan 2012 sudah mulai membaik semenjak daftar nilai para pesertanya diunggah pada laman http://snmptnppa.blogspot.com/ tapi dalam laman tersebut hanya terdapat transparansi dari beberapa PTN saja. Sebagian PTN lain belum bersedia membuka diri untuk transparansi semacam ini. Kebijakan pemerintah yang hanya melakukan SNMPTN saja ditahun 2013 yag notabene sistemnya hampir sama dengan SNMPTN Undangan tahun lalu menjadi dipertanyakan. Apakah SNMPTN tersebut dapat mengakomodasi semua anak-anak berprestasi Indonesia? Ketika pertanyaan ini kami lontarkan kepada Ibu Wijayanti, kepala bidang humas UGM beliau mengatakan belum, sebab SNMPTN hanya melihat siswa dari kriteria rapor dan prestasi semata sehingga tidak mengakomodasi anak yang kalah di sekolah unggulan dengan baik. Hal tersebutlah yang membuat UGM masih mengadakan SMBPTN dan Seleksi Mandiri untuk tahun ini. Pertimbangan UGM yang lain adalah tingkat keberhasilan mahasiswa dari jalur mandiri lebih besar daripada mahasiswa dijalur lainnya sesuai dengan penelitian UGM. Jadi sudah terbukti SNMPTN belum menjawab kebutuhan universitas untuk mendapatkan calon mahasiswa terbaiknya.

Garuda Tak kan mampu terbang tinggi!

credit: http://kepakgaruda.wordpress.com/

Polemik Penerapan Uang Kuliah Tunggal

Oleh : Ahmad Halim Pradana dan Moses Parlindungan

Upaya negara dalam hal mengusahakan kesejahteraan bagi warga negaranya dapat diejawantahkan melalui pembentukan kualitas person by person yang secara struktur pemikirannya sejalan dengan hakikat manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan berbudaya. Hal itu dapat ditempuh dengan pemenuhan pendidikan yang terkonsep dan tanpa ada batasan. Pemenuhan pendidikan bagi seluruh lapisan warga negara adalah suatu syarat mutlak dalam hal kemajuan suatu negara. Konsep pendidikan yang sewajarnya tercipta haruslah sebuah konsep yang berkelanjutan, berwawasan masa depan dan mengakomodasi segala kebutuhan negara. Nantinya, konsep ini harus mampu mempunyai relasi dengan tingkat kesejahteraan warga negara itu sendiri.

Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam hal pemenuhan pendidikan bagi warga negara nya, selalu menjadi topik hangat untuk diperbincangkan. Harmonisasi yang sudah semestinya tercipta antara kebijakan dan implementasinya, sering terbentur dengan ketidakberlanjutannya suatu konsep yang telah dicanangkan. Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945, pendidikan sejatinya merupakan hak yang ada dalam diri setiap warga negara Indonesia. Namun asa masyarakat akan pendidikan berkonsep, berkelanjutan dan berdaya guna, tidak kunjung terlaksana sebagaimana mestinya. Salah satunya terlihat dalam polemik kebijakan mengenai biaya untuk mengenyam pendidikan tinggi. Dalam hal ini, isu yang sedang muncul ke permukaan adalah konsep penerapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi calon peserta pendidikan tinggi di Indonesia.

Munculnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU PT), melahirkan harapan akan adanya

kesempatan bagi seluruh lapisan warga negara Indonesia untuk mengenyam pendidikan tinggi yang layak dan tanpa batasan. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 74 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "PTN wajib mencari dan menjaring calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20 persen dari seluruh mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua program studi." Selain dengan adanya kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah, perguruan tinggi sebagai pelaksana pendidikan tinggi memiliki hak untuk mengelola pendidikan tinggi yang secara operasional dimungkinkan berbeda-beda antara perguruan tinggi lainnya. Dalam hal ini, Perguruan Tinggi Negeri (PTN), mempunyai hak otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sesuai dengan ketentuan Pasal 62 sampai Pasal 65 UU PT. Pengelolaan tersebut semata-mata sebagai upaya melaksanakan pendidikan tinggi tanpa batasan bagi semua khalayak yang berhak akan hal tersebut.

Konsep UKT sendiri memiliki pengertian sebagai uang kuliah yang tarifnya dihitung dari unit cost (komponen biaya operasional yang diperlukan untuk proses pembelajaran dan utilitasnya di setiap wilayah diluar biaya investasi). Dengan adanya UKT, calon peserta pendidikan tinggi tidak perlu lagi membayar berbagai macam biaya, tetapi hanya membayar uang kuliah tunggal yang jumlahnya akan tetap dan berlaku sama pada tiap semester selama masa kuliah. Keberadaan kebijakan UKT sendiri didasarkan pada beberapa surat edaran, yaitu Surat Edaran Dirjen Dikti No. 21/E/T/2012 tertanggal 4 Januari 2012 tentang Uang Kuliah Tunggal, Surat Edaran Dirjen Dikti No. 274/E/T/2012 tertanggal 16 Februari 2012 tentang Uang Kuliah Tunggal, Surat Edaran Dirjen Dikti No. 305/E/T/2012 tertanggal 21 Februari 2012 tentang Larangan Menaikkan Tarif Uang Kuliah, Surat Edaran Dirjen Dikti No. 488/E/T/2012 tertanggal 21 Maret 2012 tentang Tarif Uang Kuliah SPP di Perguruan Tinggi, dan Surat Edaran Dirjen Dikti No. 97/E/KU/2013 tertanggal 5 Februari 2013 tentang Uang Kuliah Tunggal. Surat Edaran Ditjen Dikti Nomor 305/E/T/2012 tentang Tarif Uang Kuliah (SPP) menyebutkan bahwa pemerintah selalu berusaha untuk memenuhi sebagian dari biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi, antara lain biaya investasi dan operasional. Selain itu, Rektor/Direktur dan Ketua Perguruan Tinggi Negeri dimohon untuk tidak menaikkan tarif uang kuliah (SPP) untuk tahun akademik 2012/2013. Kemudian dalam Surat Edaran Ditjen Dikti Nomor 97/E/KU/2013 diatur bahwa sesuai dengan UU PT yang antara lain mengatur pembiayaan pendidikan tinggi, pemerintah telah memberikan Bantuan Operasional Perguruan

Tinggi Negeri (BOPTN) kepada PTN. BOPTN ini dilaksanakan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing perguruan tinggi. Namun waktu turunnya BOPTN ini belum dapat dipastikan.

Komparasi dengan sistem SPMA

Pada tahun 2011 dan tahun 2012, jalur masuk mandiri UGM untuk jenjang S1 sempat ditiadakan dan hanya menggunakan jalur masuk SNMPTN. Akan tetapi,pada tahun ini UGM kembali membuka jalur mandiri. Dengan skema seleksi mandiri seperti ini, kampus memiliki otonomi untuk mengatur pola pembiayaan awal dari calon mahasiswa itu sendiri. Pada posisi inilah kita sering mendengar apa yang disebut sebagai uang pangkal, atau yang di UGM disebut sebagai Sumbangan Peningkatan Mutu Akademik (SPMA). Uang pangkal adalah uang yang harus dibayarkan pada saat awal masuk perguruan tinggi. Nominal dari uang pangkal ini memang bervariasi. Di UGM sendiri, masing-masing fakultas memiliki range SPMA yang berbeda. Untuk Fakultas Hukum, rentang SPMA nya adalah 5, 10, dan 15 juta. Pada tahun 2010 dan tahun-tahun sebelumnya ketika jalur mandiri (UM UGM,red), SPMA bersifat opsional dan ditentukan secara sadar oleh masing-masing calon mahasiswa baru dengan pertimbangan masing-masing.

Sisi lain yang cukup menarik dari SPMA ini adalah potensinya untuk menjadi sistem subsidi silang yang alami. Dalam artian, karena besaran SPMA ini bersifat opsional, calon mahasiswa dengan latar belakang ekonomi yang sangat tinggi tidak akan segan untuk memilih SPMA yang tinggi pula. Sementara itu, calon mahasiswa yang berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu, bisa mengisi SPMA minimal, atau bahkan nol rupiah dengan mekanisme tertentu. Pada poin inilah sepertinya sistem UKT tidak bisa mengakomodasinya.

Pro-kontra UKT

Rencana pemberlakuan UKT ini menjadi polemik di kalangan civitas akademika dan seluruh stakeholder yang konsen di bidang perguruan tinggi. Dalam diskusi yang diselenggarakan BEM KM UGM pada 3 Maret 2013, yang dihadiri oleh Rektor UGM, Pratikno, Sekjen Kemendikbud, Ainun Naim, beberapa pejabat di lingkungan rektorat UGM dan Majelis Wali Amanat, Menteri Humas BEM KM UGM, Ical, menyatakan tidak sependapat dengan pemberlakuan UKT dengan dasar disparitas. Menurutnya total biaya kuliah dari semester satu sampai ke delapan atau semester satu sampai sebelas (untuk kedokteran) lebih murah ketika menggunakan pola pembiayaan yang sekarang ini digunakan daripada jika diubah dengan pola UKT. Namun, di sini Ical hanya memakai acuan UKT tertinggi atau UKT penuh, yang sebenarnya meskipun dinamakan "tunggal" namun besaran biaya yang dibebankan kepada tiap-tiap

Kategori	Jumlah Mhs	Jumlah UKT per Mahasiswa		Jumlah UKT per Smstr		Jumlah Smstr	Jumlah UKT Total
I	175	Rp	5,900,000.00	Rp	1,032,500,000.00	7	Rp 7,227,500,000.00
II	60	Rp	4,500,000.00	Rp	270,000,000.00	7	Rp 1,890,000,000.00
III	50	Rp	3,500,000.00	Rp	175,000,000.00	7	Rp 1,225,000,000.00
IV	65	Rp	-	Rp	-	7	Rp -
Penerimaan Fakultas Per Semster (350 Mhs)				Rp	1,477,500,000.00	**Total**	Rp 9,117,500,000.00

mahasiswa itu tidak sama.

Besaran biaya yang dibebankan kepada mahasiswa ternyata memiliki tingkatan, yaitu UKT dibayar penuh, UKT dibayar sebagian (dengan prosentase 75%, 50%, 25%) yang bergantung pada tingkat kemampuan ekonomi mahasiswa, dan yang terakhir adalah UKT cuma-cuma atau gratis bagi mahasiswa yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Jadi besaran biaya kuliah yang dibayarkan mahasiswa disatu universitas tidak sama, begitu juga antar fakultas dalam satu universitas bisas menetapkan besaran UKT yang berbeda-beda, menyesuaikan kebutuhan masing-masing fakultas.

Dari tabel di atas diketahui bahwa FH UGM menetapkan tarif UKT penuh sebesar Rp. 5.900.000,00. Besaran biaya tersebut tentu akan berbeda dengan UKT yang disusun oleh fakultas-fakultas lainnya.

Dalam kesempatan yang sama Sekjen Kemendibud, Ainun Naim, menjelaskan bahwa pada dasarnya kebijakan UKT ini sebagai wujud pemerintah untuk memperluas akses masyarakat masuk ke PTN. “UKT itu bersifat berkeadilan”, ujarnya. Hal senada juga diuraikan Pratikno. Beliau mengungkapkan landasan UKT berkeadilan adalah pada subsidi silangnya. Semakin banyak menyerap pendapatan dari si kaya untuk membantu mahasiswa dari kalangan yang kurang mampu. Beliau juga menyampaikan pesan, jangan sampai riuh penolakan yang disuarakan beberapa lembaga kemahasiswaan ini membuat kesan bahwa UGM ini kampus mahal sehingga akan berdampak pada ketidakberanian calon mahasiswa dari kalangan kurang mampu untuk mendaftar sebagai calon mahasiswa UGM. Hal ini tentu akan mengkebiri hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas.

Setiap kebijakan akan selalu memunculkan segi positif dan negatifnya, tak terkecuali kebijakan pemberlakuan UKT ini. Namun, hal yang perlu diingat adalah pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi oleh konstitusi. Sudah selayaknya ketika UKT ini diberlakukan, haruslah selalu dikawal dalam penyelenggaraanya. Jangan sampai keadilan yang dijanjikan hanya menjadi keadilan semu. Dan jangan pula sampai terdengar cerita seorang mahasiswa atau calon mahasiswa tidak dapat menempuh studi hanya karena tak kuat menanggung biaya pendidikan yang mencekik.

PRO-KONTRA STATUS PERGURUAN TINGGI

Oleh Bunga Dita Rahma Cesaria, Ageng Prabandaru, Christy Ullisa Situmeang

Perubahan status perguruan tinggi di Indonesia masih terus terjadi. Pemerintah seolah-olah belum juga merasa puas dengan rancangan sistem pendidikan yang telah dibuat melalui berbagai undang-undang. Imbasnya, perguruan tinggi di Indonesia harus bersabar dengan status mereka yang bisa berubah setiap waktu, juga kebijakan-kebijakan di dalamnya yang juga harus disesuaikan terus menerus. Dengan terus berpikiran positif bahwa segala perubahan aturan yang ada di tengah-tengah dunia pendidikan adalah semata-mata untuk memajukan anak bangsa, perguruan-perguruan tinggi di Indonesia nampak masih menyanggupi kerepotan yang disebabkan oleh pergantian aturan yang dibuat oleh pemerintah. Sebut saja Universitas Gadjah Mada (UGM). UGM telah mengalami berbagai macam perubahan status dari dulu hingga sekarang.

Dimulai dari perubahan status Perguruan Tinggia Negeri (PTN) menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dengan PP No. 61 Tahun 1999. Dasar hukum dari pembentukan BHMN adalah pasal 1653 KUHPerdata yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mendirikan badan hukum. Selain itu, salah satu alasan PTN diubah menjadi BHMN disebabkan oleh krisis pada masa Orde Baru. Sehingga dengan sistem BHMN ini, pemerintah dapat memotong anggaran biaya untuk pendidikan saat

itu. Sistem BHMN memberi keleluasaan bagi perguruan tinggi dalam mengatur rumah tangganya sendiri tanpa intervensi dari pemerintah. Perguruan tinggi yang berstatus BHMN tidak akan mendapat subsidi dari pemerintah, sehingga perguruan tinggi tersebut bebas mencari dana sendiri. Dengan begitu sebagai BHMN, perguruan tinggi dapat menaikkan Sumbangan Pembayaran Pendidikan (SPP) mahasiswa setinggi-tingginya.

Status UGM sebagai BHMN sesuai dengan PP No. 153 Tahun 2000 Tentang Penetapan Universitas Gadjah Mada Sebagai Badan Hukum Milik Negara disebut-sebut sebagai penyelewengan dari janji UGM sebagai kampus kerakyatan. Hal ini dikarenakan UGM juga mengacu pada UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang pada pasal 9 menyatakan bahwa masyarakat berkewajiban memberi dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Pasal tersebut memperjelas bahwa pendidikan tidaklah diperoleh dengan cuma-cuma. Untuk mengecap pendidikan, masyarakat seolah-olah diharuskan memberi imbalan kepada negara. Padahal pendidikan memiliki ruang tersendiri dalam UUD 1945 tepatnya dalam Bab XIII tentang Pendidikan yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan dan pemerintah berkewajiban untuk memenuhinya. Selain itu pendidikan juga disebut-sebut sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konstitusi kita. Dengan begitu undang-undang yang mengharuskan rakyat memberi dukungan sumber daya untuk mendapatkan suatu hak yang telah dijamin oleh konstitusi seharusnya tidak pernah ada, begitu juga dengan implementasinya di tengah-tengah prosedur penerimaan mahasiswa baru ke perguruan tinggi saat itu. Tidak heran status "kerakyatan" UGM yang terkenal itupun menimbulkan pertanyaan pada banyak kalangan saat itu, bahkan sampai sekarang.

UGM yang dahulunya berstatus BHMN, kini melalui PP 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraaan Pendidikan harus mengubah statusnya menjadi perguruan tinggi dengan pola

pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Berdasarkan sumber yang ada, pada akhir 2011 UGM telah diperlakukan sebagai PT BLU dengan mewajibkan UGM untuk melakukan pengesahan realisasi pendapatan dan belanja tahun anggaran 2011 serta menyampaikan saldo akhir kas. Lagi-lagi, perubahan status ini menimbulkan polemik bagi UGM. Salah satu masalah yang timbul adalah pola pengelolaan keuangan. Sistem pengelolaan keuangan yang dilakukan BLU akan mengubah perlakuan terhadap penerimaan dan pengelolaan dana yang diterima oleh UGM dengan cara memasukkan pendapatan masyarakat ke dalam kas negara. Oleh karena itu, dana masyarakat akan diperlakukan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang menjadi kesatuan dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Dengan adanya pola pengelolaan keuangan seperti ini, segala sesuatu yang diselenggarakan UGM harus berdasar pada UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, seperti dalam hal penetapan tarif, siklus perencanaan, penggunaan, pelaporan, serta pengesahan oleh DPR sebelum uang yang ada digunakan untuk menyelenggarakan sesuatu. Dapat disimpulkan bahwa sistem pengelolaan keungan BLU ini harus melalui mekanisme *checks and balances* antara pihak universitas dengan pemerintah.

Dana masyarakat yang biasanya dikelola secara otonom oleh UGM juga harus diubah sistemnya. Seperti yang telah diketahui selama berstatus sebagai PT BHMN, UGM bebas membuka jalur khusus penerimaan mahasiswa baru selain yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tujuannya tidak lain adalah untuk mendapatkan dana lebih dari uang masuk yang bebas ditetapkan oleh pihak UGM. Namun, dengan menyandang status BLU, sistem penerimaan mahasiswa baru yang selama ini diterapkan juga harus dirubah. Tentu saja UGM tidak bisa lagi menerapkan otonominya dalam mengatur dana dari uang masuk mahasiswa baru.

Perubahan status ini juga membuat UGM menjadi salah satu objek dari Badan Pemeriksa Keungan

(BPK) untuk melakukan pengauditan. Menurut hasil audit yang telah dilakukan oleh BPK, telah banyak ditemukan permasalahan-permasalahan baru, antara lain permasalahan pengadaan barang dan jasa serta adanya penerimaan dana masyarakat yang tidak di setor ke rekening rektor. Dengan adanya permasalah ini, timbul suatu pertanyaan apakah masalah-masalah inikah yang membuat biaya pendidikan di UGM menjadi mahal? Apakah selama ini UGM hanya menjadikan status BHMN untuk bisa melakukan otonomi yang berlebihan termasuk dalam hal penetapan biaya pendidikan? Beluam ada yang dapat menyimpulkannya, namun diharapkan dengan perubahan status ini, maka UGM dapat mengembalikan slogan yang selama ini sudah dikenal oleh masyarakat terutama civitas akademika yaitu, menjadikan UGM kembali sebagai kampus kerakyatan.

Namun, selain dari kekurangan BHMN yang telah disebutkan diatas, BHMN sendiri memilki banyak kelebihan yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Contohnya saja dalam masalah beasiswa, otonomi untivesitas, dan kualitas pendidikan. Dengan adanya sistem BLU, kualitas pendidikan untuk setiap daerah dapat disetarakan.

Dengan majunya kualitas pendidikan akan membuat berbagai permasalah di Indonesia akan mudah untuk diselesaikan, seperti masalah Sumber Daya Alam (SDA), masalah ekonomi, masalah politik, dan berbagai masalah lainnya. Namun, majunya kualitas pendidikan ditentukan dengan mandirinya sebuah lembaga pendidikan dalam menjalankan tugasnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Satrio Sumantri Brojonegoro, mantan dirjen dikti, menyebutkan beberapa kampus di negara-negara Asia seperti di Malaysia, Thailand, Jepang dan China mengalami kemajuan pesat dibanding Indonesia karena telah melaksanakan otonomi perguruan tinggi yang begitu luas.

Dibutuhkan otonomi untuk memajukan sebuah pendidikan, namun tetap otonomi tersebut masih dalam batas-batas yang telah ditentukan. Dengan adanya otonomi,

universitas mampu untuk memberikan bantuan secara efektif kepada masyarakatnya, contohnya ketika UGM memberikan bantuan bidik misi kepada mahasiswanya. Dana tersebut tidaklah langsung turun dari dikti namun, dikti sendiri meminta UGM untuk menalangi dana tersebut terlebih dahulu. Direktur Keuangan UGM, Drs. Haryono, Akt., M.Com "Ada surat dari Dikti yang meminta UGM agar menalangi dulu," katanya. Dana tersebut didapatkan dari pemasukan universitas lewat otonominya.

Rektor UGM Prof. Dr. Pratikno dalam Simposium Nasional 'Kontroversi Status PTN dan Masa Depan Otonomi Akademik' yang berlangsung di Auditorium Sukadji Ranuwihardjo Magister Managemen FEB UGM, Sabtu 6 April 2013 lalu berpendapat bahwa pendidikan tinggi Indonesia membutuhkan kebijakan revolusioner untuk meningkatkan percepatan kualitas pendidikan tinggi agar bisa sejajar dengan perguruan tinggi luar negeri yang sudah lebih maju. Debirokratisasi di bidang pendidikan sangat dibutuhkan agar perguruan tinggi mampu meningkatkan kualitas kerja dan kualitas pendidikannya.

Selain itu, dengan menggunakan sistem BLU, perguruan tinggi sendiri akan kesulitan untuk mencairkan dananya dikarenakan proses birokrasi yang terlalu rumit. Hal ini dikarenakan setiap kali ada acara atau event harus mendapat persetujuan dari dikti dan kemendikbud bahkan untuk acara atau event-event yang terbilang minor. Kesulitan administrasi akan menyebabkan perguruan tinggi hanya berkutat pada masalah tersebut dan malah bisa berdampak pada berkurangnya kualitas pendidikan, karena kebijakan yang sangat dibatasi dan berkurangnya produktifitas dari kalangan akedimisi itu sendiri.

Semua kebijakan yang diambil pemerintah pasti telah dipertimbangkan baik dan buruknya pada yang diberi kebijakan. Namun, itu tidak berarti semua kebijakan pemerintah benar adanya. Terkadang masyarakat sendiri harus kritis pada kebijakan yang keluarkan oleh pemerintah. Masayarakat tidak boleh serta merta menganggap pemerintah

selalu benar, namun juga tidak boleh menganggap bahwa oponi mereka juga selalu benar. Baik buruknya BLU atau BHMN dikembalikan pada penilaian dari masing-masing individu, karena keadilan bukanlah hal yang mutlak dan akan selalu berbeda pada setiap manusianya.(***)

MENCARI ILMU TANPA BATASAN

Oleh : Petrus Sian Edvansa

Tren pendidikan internasional di Indonesia semakin hari semakin bertumbuh dan berkembang. Universitas Gadjah Mada (UGM) pun seakan tak mau kalah. Berbagai macam program internasional di beberapa fakultas pun dibuka. Di Fakultas Hukum (FH) sendiri, pendidikan model internasional ini mulai beroperasi sejak tahun 2008 dan masih berjalan hingga sekarang. Selain dengan program internasionalnya, UGM juga membuka program-program pertukaran pelajar kepada para mahasiswa asal Amerika Serikat, Ingrris, Prancis, dan masih banyak lagi.

Universalitas dan keterbukaan pendidikan di kawasan UGM tentu akan menarik minat banyak mahasiswa asing belajar di Indonesia. Kita pastilah sering melihat mahasiswa luar negeri berjalan mondar mandir di FH UGM, dan hal itu membuat MAHKAMAH tergoda untuk mengkaji fenomena ini. Kajian ini menjadi menarik karena ketika disaat banyak anak muda Indonesia bercita-cita untuk mengenyam pendidikan di luar negeri (meskipun mungkin hanya alat untuk menaikkan gengsi dan status sosial), masih ada saja orang asing yang berminat mengenyam pendidikannya di negara Indonesia. Apakah ini menjadi sebuah tanda bahwa pendidikan di Indonesia sudah dapat diperhitungkan secara global, atau mereka hanya sekedar mencari pengalaman bagaimana rasanya belajar di negera dunia ketiga?

Terkait hal ini, MAHKAMAH memutuskan untuk mewawancarai

Abdou Jallow, seorang mahasiswa *International Undergraduate Program* (IUP) angkatan 2010 asal Gambia. Apa yang kemudian membuat pemuda dari sebuah negara kecil di Afrika Barat yang berjarak 13.000 kilometer jauhnya dari Indonesia ini untuk melanjutkan pendidikannya di FH UGM? Awak Mahkamah kemudian membuat janji untuk mewawancarai Abdou. Ketika awak MAHKAMAH bertemu pertama kali dengannya dan menjelaskan tentang apa maksud MAHKAMAH mewawancarainya, Abdou yang tidak paham bahasa Indonesia ini tiba-tiba saja langsung berkata (dalam bahasa Inggris, tentu saja.) "Saya tidak akan menceritakan omong kosong padamu, saya akan menceritakan apa yang saya rasakan tentang sistem pendidikan di kampus ini!" sebuah kelugasan, kejujuran, dan keberanian yang jarang dimiliki oleh mahasiswa Indonesia.

Hari jumat siang, sekitar pukul 11.00 WIB, awak MAHKAMAH memulai wawancara ini, pancaran sinar matahari yang sangat terik siang itu tidak mengurangi semangat maupun antusiasme Abdou dalam menceritakan pengalaman dan pandangannya terhadap kampus ini pada MAHKAMAH. Ketika MAHKAMAH menanyakan soal pilihannya mengapa ia memilih FH UGM, secara mengejutkan, Abdou berkata dia hampir tidak mengetahui apa-apa tentang Indonesia maupun sistem pendidikan di Indonesia. Ceritanya sederhana saja, pada September 2009 ia secara tak sengaja bertemu dengan kawan lamanya Ibrahim, yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil di Gambia yang mendapatkan beasiswa belajar di Fisipol UGM. Mereka kemudian saling berbagi cerita dan Ibrahim bertutur tentang pengalamannya sebagai mahasiswa Gambia di UGM. Abdou yang pada saat itu telah memutuskan untuk melanjutkan kuliah hukumnya di sebuah universitas di Ghana kemudian memutuskan akan mencoba mendaftar di UGM, awalnya ia berkorespondensi dengan FH UGM melalui telepon dan surat elektronik. "Saya mengontak UGM dan kemudian disambungkan kepada sekretariat program internasional. Mereka tidak berkata bahwa ini adalah program baru, mereka mengatakan bahwa ini adalah program internasional

mengambil *dual-degree* dengan sistem pengajaran berstandar internasional dan macam-macam lagi omong kosongnya. Kalau bisa dibilang, saya hanya punya sedikit pengetahuan tentang apa yang akan saya hadapi kedepannya di sini. Saya hanya mempercayai apa yang sekretariat katakan" tandasnya pada MAHKAMAH.

Kami kemudian bertanya pada Abdou mengenai kepuasannya terhadap sistem pendidikan yang ia dapatkan di fakultas ini. Ia mengaku sangat kecewa dan merasa dibohongi oleh fakultas pada awalnya. "Saya merasa sangat frustrasi di awal masa pendidikan saya. Saya rasanya ingin pulang ke Gambia, lalu pindah universitas." Abdou sangat merasa dirugikan ketika standar dan harapannya tentang FH UGM yang didapatnya melalui telepon dan penelusuran internet sangat berbeda jauh dari realita. Ketika pihak fakultas mengatakan bahwa program ini akan sepenuhnya diadakan dalam bahasa Inggris, ternyata masih ada mata kuliah yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya. "Saya belajar pada program internasional sebagai mahasiswa asing. Sangatlah tidak masuk akal ketika perkuliahan dilakukan dalam bahasa Indonesia saat sekretariat mengatakan ini adalah program internasional dan perkuliahan akan berlangsung dengan bahasa Inggris. Saya, bahkan semua mahasiswa asing akan sangat frustrasi dengan hal ini! Mereka mengatakan, jika saya ingin belajar bahasa Indonesia maka saya harus mempelajarinya sendiri. Fakulltas tidak menyediakan karena ini adalah program internasional," katanya. Namun, Abdou juga tidak menampik bahwa program ini telah mengalami beberapa kemajuan dan peningkatan. Termasuk kualitas dari para pengajarnya.

Terkait biaya pendidikan di Indonesia yang kian mahal, Abdou justru merasa bahwa biaya belajar di Indonesia cukup terjangkau untuk kantongnya. Ia membandingkan dengan biaya yang harus dibayarkan apabila ia memasuki universitas di Ghana. Ia berkata, "Saya dulu memutuskan untuk melanjutkan kuliah di Ghana. Ketika saya membandingkan biaya pendidikan di Ghana dengan Indonesia, saya melihat biaya kuliah di

Ghana jauh lebih tinggi daripada di Indonesia. Di Ghana, saya harus mengeluarkan uang sebesar 9000 Dollar per tahun untuk biaya pendidikan, sedangkan di Indonesia, saya haya memerlukan 5000 Dollar per tahun. Juga biaya hidup disini tidak terlalu mahal." Ketika awak MAHKAMAH menuturkan bahwa pada umumnya mahasiswa Indonesia harus membayar berbagai macam uang pangkal yang tidak sedikit sebelum menyandang status sebagai mahasiswa, Abdou berkata heran, "Saya tidak pernah menemukan sistem seperti itu selain di sini. Mungkin ada indikasi korupsi atau agenda politik dibelakangnya, tapi saya tidak ingin menerka-nerka. Saya tidak berwenang untuk itu. Universitas Gadjah Mada adalah universitas negeri dan pemerintah mengucurkan dana amat banyak untuk ini. Aneh menurut saya ketika harus meminta uang yang banyak dari para mahasiswanya."

Sayang waktu yang kami punya untuk mengadakan sesi wawancara ini terbatas, siang itu Abdou harus bergegas untuk mengejar waktu ibadah shalat jumat. Maka dengan berat hati harus kami sudahi wawancara ini. Namun, sepertinya Abdou belum kehabisan cerita untuk dibagi pada MAHKAMAH. Mungkin lain waktu, akan ada kesempatan untuk MAHKAMAH mewawancarainya lagi.

Penyaluran Beasiswa, Efektifkah?

Oleh
Kurniawan Nur Shidiq, Benedictus Wisnu Herbowo, Yohanes Aditya

Rubrik parameter kali ini menampilkan data tentang penyaluran beasiswa di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM). Dari hasil poling yang melibatkan mahasiswa FH UGM mulai dari angkatan 2010, 2011 dan 2012 yang tiap angkatan diambil 10 sample, maka didapat hasil yang mudah-mudahan sudah dapat merepresentasikan pendapat mahasiswa FH UGM secara keseluruhan.

Ketika ditanya mengenai efektifitas penyaluran informasi beasiswa di lingkungan FH UGM, sebanyak 63% responden menyatakan bahwa distribusi informasi yang diterima mahasiswa belum efektif. Sedangkan sebanyak 37% menganggap penyaluran informasi sudah efektif. Banyak yang beranggapan bahwa untuk mendapat informasi tersebut, mereka harus mencari tahu sendiri, sedangkan yang mereka harapkan adalah pelayanan dari fakultas secara langsung. Mahasiswa beranggapan bahwa seharusnya penyampain informasi beasiswa dapat juga menggunkan layanan *sms gateway* yang kini sudah mulai digunkan pihak fakultas dalam menyampaikan informasi.

Selanjutnya mengenai akses informasi beasiswa, sebanyak 60% responden berpendapat bahwa sebenarnya akses tersebut mudah didapat, namun tentu saja harus ada keaktifan dari mahasiswa itu sendiri.

Sekitar 27% responden menyatakan akses itu susah-susah gampang. Sedangkan hanya sekitar 13% responden beranggapan bahwa akses info beasiswa tersebut sulit didapatkan. Ketika ditanya kesulitannya, ternyata seluk-beluk penginformasian beasiswa cukup menyulitkan mahasiswa angkatan baru. Mungkin karena kurangnya sosialisasi mengenai adanya penawaran beasiswa tersebut.

Kemudian, jika para responden ditanya mengenai bagaimana mereka mendapatkan informasi penawaran beasiswa tersebut, maka sebanyak 65% menjawab mereka mendapatkannya dari kertas pengumuman yang ditempel di papan-papan pengumuman. Lalu sebanyak 29% responden menyatakan mereka mendapatkan informasi beasiswa dari internet atau sosial media. Itu artinya mereka aktif mencari tahu apakah ada penawaran beasiswa. Kemudian ada sekitar 6% responden menjawab mereka harus mendatangi bagian akademik untuk mendapatkan informasi tersebut. Hal tersebut dilakukan karena kebanyakan pengumuman yang ditempel di papan pengumuman sudah usang dan lewat waktu pendaftarannya.

Ada lagi mengenai sistem pemberian beasiswa. Sistem pemberian beasiswa di sini diartikan sebagai bagaimana instansi pemberi beasiswa menjaring mahasiswa yang akan memperoleh beasiswa tersebut. Dalam poling tersebut dapat dilihat sebanyak 57% responden beranggapan belum tepat sasaran. Sedangkan sebanyak 43% responden menyatakan bahwa sistem pemberian beasiswa sudah tepat sasaran sudah tepat.

Selanjutnya mengenai pembenahan dalam penyaluran beasiswa kepada mahasiswa, sekitar 40% mahasiswa menyatakan bahwa beasiswa yang ditawarkan masih sedikit dan perlu ditambah jumlahnya. Lalu sebanyak 17% responden menjawab penyaluran informasi beasiswa yang saat ini sudah ada dianggap sudah bagus. Sekitar 16% responden menganggap persyaratan untuk

mengajukan beasiswa masih berbelit-belit. Kebanyakan karena mereka berasal dari luar kota dan dalam persyaratannya dibutuhkan surat-surat seperti kartu keluarga, daftar gaji orang tua, atau persyaratan lain yang hanya disimpan di rumah. Meski sekarang teknologi sudah maju, seperti ada faksimile, tetapi hal tersebut masih dirasa memberatkan. Kemudian ada sekitar 27% responden menyatakan bahwa penyebaran informasi beasiswa masih harus dibenahi. Kadang ada mahasiswa yang baru tahu ada penawaran beasiswa saat hari terakhir pendaftaran. Tentu saja itu sangat merugikan mahasiswa, mengingat persyaratannya yang harus dipenui cukup banyak.

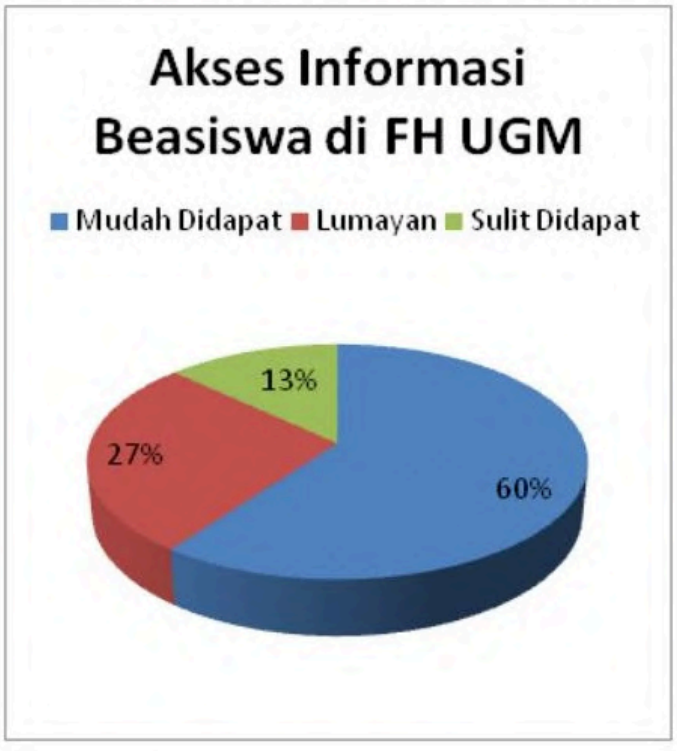

Pada dasarnya beasiswa memang di salurkan kepada individu-individu yang memenuhi syarat dan terpilih untuk digunakan dalam mendukung kegiatannya di kampus, baik itu untuk membayar SPP dan BOP maupun untuk kebutuhan membeli buku pegangan. Namun dalam perkembangannya, karena penyalurannya dilakukan secara tunai ke rekening mahasiswa, maka uang itu sering disalahgunakan. Memang itu hak tiap individu mahasiswa namun tentu saja alangkah baiknya uang itu digunakan sesuai tujuan awal pemberiannya. Masih banyak orang di negeri ini yang tidak bisa meneruskan pendidikan karena masalah ekonomi, lalu masihkah kita semua menyia-nyiakan uang beasiswa tersebut.

Pembenahan Pemberian Beasiswa
Ditambah Jumlahnya
Persyaratan Dipermudah
Memperluas Penginformasian
Sudah Bagus
33%
48%
19%

Sudah tepatkah Sistem Pemberian Beasiswa
Sudah Tepat
Belum Tepat
43%
57%

Cara Mendapatkan Infomasi Beasiswa
Papan Pengumuman
Bagian Akademik
Internet/ Media Sosial
Dari Temen
0%
29%
65%
6%

Efektifitas Penyaluran Informasi Beasiswa di FH UGM
Sudah Efektif
Belum Efektif
37%
63%

Ganti Menteri, Ganti Kurikulum

Oleh Efie Handayani, Pramudana Gian Pitra Utama, Chandra Purnama

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) mengamanatkan bahwa pembentukan Pemerintah Negara Indonesia antara lain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan upaya tersebut, pasal 31 ayat 3 UUD 1945 mengamanatkan agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Implementasi dari Pembukaan UUD 1945 dan pasal 31 ayat 3 UUD 1945 yakni pemerintah akan melaksanakan kurikulum 2013 yang rencananya akan dilaksanakan secara bertahap pada semua jenjang pendidikian mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun ajaran 2013-2014. Tekad pemerintah untuk mewujudkan kualitas pendidikan yang lebih baik memang perlu diapresiasi dan layak untuk diacungi jempol. Namun, banyak kalangan menilai penerapan kurikulum 2013 terlalu tergesa-gesa dan dipaksakan.

Kurikulum 2013 pada dasarnya merupakan suatu konsep pembaharuan kurikulum pendidikan yang lebih menitikberatkan pada upaya penyederhanaan dan metode tematik-integratrif. Upaya penyederhanaan ini lebih condong ke arah penyederhanaan mata pelajaran karena kurikulum sekarang yang masih berlaku yakni KurikulumTingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dianggap terlalu banyak memuat mata pelajaran sehingga imbasnya terlalu membebani peserta

didik. Sedangkan metode pembelajaran tematik adalah metode pembelajaran yang mengintregrasikan berbagai macam kompetensi dari berbagai mata pelajaran. Integrasi ini ditekankan pada dua hal yaitu integrasi sikap, kemampuan/ketrampilan, dan pengetahuan dalam proses pembelajaan serta pengitegrasian berbagai konsep dasar yang berkaitan. Hasil dari metode ini diharapkan mampu mengubah dan memberikan pelajaran yang lebih bermakna kepada peserta didik. Pencapaian yang diharapkan adalah peserta didik dapat berakhlak mulia seperti yang diamanatkan dalam pasal 31 ayat 3 UUD 1945.

Terdapat beberapa perbedaan mendasar antara kurikulum 2013 dengan kurikulum KTSP yakni diantara sebaga berikut: Pertama, mata pelajaran SD dikurangi dari 10 mata pelajaran menjadi 6 mata pelajaran dengan integrasi mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) ke dalam mata pelaran Bahasa Indonesia dan Matematika sedangkan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) akan diintegrasikan ke mata pelajaran Bahasa Indonesia dan PPKn. Akan tetapi, dengan pengurangan mata pelajaran ini tidak menjadikan jam pelajaran berkurang tetapi justru menambah jam pelajaran. Kedua, untuk jenjang SMP jumlah mata pelajaran akan dikurangi dari 12 mata pelajaran menjadi 10 mata pelajaran pada kurikulum 2013 ini dengan catatan mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) yang pada kurikulum sebelumnya berdiri sendiri sebagai mata pelajaran akan diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran. Hal ini membuat banyak kalangan pesimis terhadap pelaksanaan kurikulum ini.

Sikap optimis pemerintah yang ingin melakukan perbaikan kualitas pendidikan dengan memaksakan pelaksanaan kurikulum 2013 nampaknya masih disikapi skeptis oleh sebagian kalangan. Banyak yang menilai bahwa Kurikulum 2013 penuh ketergesaan dan sarat akan komersialisasi politik. Hal ini nampak dari jumlah anggaran asli mata belanja Kurikulum 2013 dalam APBN 2013 senilai 684 milyar rupiah yang kemudian membengkak menjadi 2,49 triliun rupiah. Angka yang cukup fantastis dan sangat disayangkan jika tak sebanding

dengan aspek perencanaan yang matang. Hal ini disampaikan oleh Divisi monitoring pelayananan publik Indonesia Coruption Watch (ICW), Siti Juliantari Rahman, yang mengatakan "Pembengkakan anggaran untuk kurikulum 2013 yang sangat tergesa-gesa dan masih compang-camping itu lebih mengisyaratkan komersial politik semata".

Pemaksaan pelaksanaan kurikulum ini juga dilatarbelakangi oleh tindakan anarkis pelajar yang akhir-akhir ini marak terjadi dan adanya bentuk protes keras terhadap kurikulum saat ini yaitu kurikulum KTSP yang dianggap terlalu membebani siswa. Selain itu kurikulum ini digadang-gadang pemerintah untuk mampu mengantisipasi ketinggalan, mempercepat ketinggalan pelajaran serta menunjang pendidikan nasional ke arah yang lebih baik yang juga menjadi tujuan nasional.

Namun, sikap skeptis dan penuh ketidakpercayaan terhadap sikap pemerintah harus dianggap sebagai sesuatu yang wajar disikapi oleh pemerintah. Bagaimana tidak, masyarakat menilai perubahan kurikulum pendidikan dari tahun ke tahun tidak selalu membawa hasil yang positif kepada peserta didiknya dan tidak pernah memecahkan permasalahan yang ada. Namun, hal ini dibantah oleh pemerintah. Dalam draf Kurikulum 2013, pemerintah mengklaim bahwa kurikulum merupakan salah satu unsur yang bisa memberikan kontribusi yang signifikan untuk mewujudkan proses berkembangnya kualitas potensi peserta didik. Sehingga dengan adanya perubahan kurikulum, diharapkan terjadi peningkatan sikap dan moral para pelajar, termasuk mengurangi sikap anarkis pelajar yang akhir-akhir ini marak terjadi.

Perubahan kurikulum memang diperlukan, tapi apakah dengan berubahnya kurikulum yang tergesa-gesa dan penuh keterpaksaan akan merubah kualitas pendidikan Indonesia ke arah yang lebih baik? Majunya tingkat pendidikan tidak hanya berdasarkan dengan perubahan kurikulum yang dilakukan terus menerus oleh pemerintah. Salah satu studi terkini, berjudul The Learning Curve (2012), meneliti faktor-faktor keberhasilan sistem pendidikan di

berbagai negara yang sama sekali tidak menyebutkan kurikulum sebagai faktor utama. Dalam studi tersebut, kualitas guru dan kualitas budaya belajarlah yang menjadi faktor utama berhasilnya kualitas pendidikan. Hal ini seharusnya menjadi landasan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk berpikir ulang tentang konsep peningkatan kualitas pendidikan. Kurikulum bukan satu-satunya faktor keberhasilan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, namun faktor guru sebagai penyalur ilmu dan budaya belajar lah yang harus diperbaiki demi kualitas pendidikan yang lebih baik. Rendahnya kualitas guru di Indonesia merupakan faktor terbesar penyumbang keterpurukan pendidikan di Indonesia sehingga peningkatan kualitas guru merupakan langkah nyata untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia, bukan dengan pergantian kurikulum. Adanya guru yang berkualitas diharapkan tidak hanya mampu untuk menyalurkan ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya, tetapi juga mampu untuk mengubah pola perilaku budaya belajar peserta didik . Hal ini diharapkan bahwa pendidikan yang terjadi tidak hanya pendidikan yang sifatnya kognitif semata tetapi pendidikan pembangunan karakter juga.

Terlepas dari adanya pro kontra pelaksanaan kurikulum 2013 yang sebentar lagi akan diterapkan, sebagai mahasiswa yang notabene diklaim sebagai "agen of change" maka patutlah kita mengawal pelaksanaan kurikulum ini agar terhindar dari komersialisasi politik yang ujung-ujungnya akan berimbas pada kehancuran pendidikan Indonesia.(***)

Dibalik Nama Sang Penggagas Tut wuri handayani

Oleh
Dyahwara, Pitra Hadiwardoyo, Mohamad Nurdin

" Ing ngarso sung tulada, Ing madya mangun karsa, Tut wuri handayani."

Di depan memberi teladan, di tengah menghidupkan gairah, di belakang memberi pengarahan, semboyan yang tak akan pernah padam untuk pendidikan Indonesia. Sang penggagas yang tak pernah terlupakan oleh dunia pendidikan Indonesia. Sosok bapak pendidikan yang dekat dengan rakyat, keluarga ,dan sosok yang dikenal dengan sifatnya *Kras maar nooit grof*. Sosok yang keras tetapi tidak kasar, itulah Ki Hajar Dewantara.

Sang pemimpi dan penggagas pergerakan pendidikan ini terlahir dari lingkungan keluarga Keraton Yogyakarta dengan nama kecil Raden Mas Soewardi Soeryaningrat pada tanggal 2 Mei 1889. Mengawali karir dengan mengemban pendidikan sekolah Dasar di ELS (Sekolah Dasar Belanda) kemudian sempat melanjut ke STOVIA (Sekolah Dokter Bumiputera), tetapi tidak sampai selesai dikarenaakan beliau mengidap suatu penyakit. Karir beliau di dunia pendidikan dimulai saat beliau mulai bekerja sebagai penulis yang kritis dan handal di beberapa surat kabar, antara lain di Sediotomo, Midden Java, De Expres, Oetoesan Hidia, Kaoem Moeda, Tjahaja Timoer, dan Poesara. Peran perjuangan Ki Hajar Dewantara mulai terlihat saat beliau selalu menuliskan kritik pada kebijakan kebijakan penjajah Belanda. Salah satu bentuk kritikan tajamnya ada pada tulisannya yang berjudul Als ik eens Nederlander was (Seandainya saya orang Belanda) saat itu dimuat dalam surat kabar De Expres milik Dr. Douwes

Dekker Tahun 1913 dikarenakan beliau merasa malu sebagai orang Indonesia yang ikut merayakan kemerdekaan Belanda di Indonesia yang saat itu belum merdeka. Dan hal yang membuat beliau merasa terinjak-injak lagi, perayaan kemerdekaan tersebut dilaksanakan dengan memungut uang dari pribumi. Selain itu bentuk pengberontakan Ki Hajar Dewantara terhadap pemerintahan kolonial Belanda yaitu dengan mengirim telegram kepada Ratu Belanda berisi usulan untuk mencabut Pasal 11 RR (Regerings Reglement – UU Pemerintahan Negeri Jajahan) yang melarang organisasi politik di Hindia-Belanda

Akibat tulisan-tulisannya yang menyebabkan pemerintah Hindia Belanda naik pitam, maka Ki Hajar Dewatara beserta Douwes Dekker dan Cipto Mangoenkoesoemo dibuang ke Belanda pada tahun 1913. Namun, dalam masa pembuangannya tersebut, Ki Hajar Dewantara justru memanfaatkannya untuk memperluas pengetahuannya mengenai pendidikannya dan pengajaran lebih lagi hingga ia memperoleh suatu ijazah pendidikan yang disebut dengan Europeesche Akte.

Sepulangnya ke Indonesia pada tahun 1918, Ki Hajar Dewantara pun menerapkan semua ilmu yang ia peroleh di Belanda untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia. Akhirnya pada 3 Juli 1922, ia bersama dengan rekan-rekannya mendirikan sebuah perguruan yang bercorak nasional, Nationaal Onderwijs Instituut Tamansiswa (Perguruan Nasional Tamansiswa). Dalam proses pendirian Perguruan Taman Siswa tersebut tidaklah mudah. Pemerintah Belanda senantiasa mencari cara untuk menghalang-halangi berdirinya Taman Siswa dengan cara mengeluarkan Ordonansi Sekolah Liar pada 1 Oktober 1932. Namun hal ini tidak menyurutkan semangat Ki Hajar Dewantara bersama rekan-rekannya untuk mengembangkan pendidikan Indonesia. Hingga pada akhirnya Ordonansi Sekolah Liar tersebut dicabut.

Berkat usahanya mengembangkan pendidikan nasional, maka setelah masa kemerdekaan, Ki Hajar Dewantara pernah menjabat

sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang pertama. Hingga saat ini, namanya dikenang sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Bahkan hari kelahirannya pada tanggal 2 Mei dijadikan sebagai hari Pendidikan Nasional.

Semboyan yang tak pernah lepas dari ingatan kita sebagai pelaku pendidikan dan mendarah daging di dalam diri adalah semboyan Ki Hadjar Dewantara yang berbunyi Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tut Wuri Handayani. Semboyan tersebut memiliki arti yang sangat mendalam bagi pendidikan di Indonesia, yaitu dari depan memberi teladan, dari tengah memberi semangat, dari belakang memberi dorongan. Hal ini berkaitan dengan peran guru dalam dunia pendidikan dan dalam membimbing siswa-siswinya.

Sosok seorang Ki Hadjar Dewantara menjadi teladan terutama dalam bidang pendidikan. Usaha-usaha untuk mengenang kembali kiprah beliau tidak lain adalah bentuk kerinduan terhadap sentuhannya dalam menanam bibit awal pendidikan nasional bangsa Indonesia. Perjalanan Ki Hadjar Dewantara meninggalkan jejak kemuliaan sepanjang hidupnya. Jejak ini disusuri sejak beliau muda hingga perjuangan untuk meng-institusionalisasikan idealismenya terkait pendidikan. Pemikiran dan tulisan-tulisan beliau tersebar diberbagai penjuru Indonesia, kesemuanya mengarah pada satu tujuan, Indonesia berpendidikan. Bahwa seorang Ki Hadjar Dewantara memulai kegiatannya dalam mengadvokasi tegaknya institusi formal pendidikan nasional membuka luas ruang kemungkinan percepatan kemajuan bangsa Indonesia. Begitu pentingnya sosok Ki Hadjar Dewantara ini dalam peletakan batu pertama penyusunan dasar-dasar pendidikan nasional. Maka penting pula menyusuri pemaknaan dan pemahaman beliau terhadap beberapa hal terkait pendidikan. Pemahaman Ki Hadjar Dewantara terhadap esensi pendidikan menunjukan bahwa ia adalah seorang yang begitu among. Beliau berpendapat bahwa setiap anak manusia memiliki fitrahnya sebagai seseorang yang memiliki potensi untuk berkembang.

Pada kesempatan lain, beliau berbicara bahwa proses pendidikan

hendaknya memanusiakan manusia, terlihat jelas sisi humanis beliau dari sudut pandang ini. Beliau memaknai keberadaan peserta didik dalam proses pendidikan sebagai mahluk yang memiliki potensi untuk memahami diri sendiri menurut kodratnya. Pengertian beliau tentang pendidik juga menyentuh sisi kemanusiaan. Menurutnya pendidik adalah seorang yang mampu memberi arahan dan tuntunan, juga sebagai fasilitator dan motivator bagi peserta didik. Dengan kembali menggali pemaknaan dan pemahaman seorang Bapak Pendidikan Nasional, maka menarik untuk merujuk keadaan saat ini dengan idealisme awal yang dibangun. Kondisi mutakhir pendidikan nasional mengalami turbulensi terutama dalam hal penyelenggaraan, fasilitas dan sumber daya manusia. Penyelenggaran pendidikan diera reformasi yang dilandasi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menuai banyak tantangan. Beberapa kebijakan yang mendapat sorotan adalah penyelenggaraan Ujian Nasional (UN), penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang pada akhirnya diputus Mahkamah Konstitusi sebagai inkonstitusional. Pengadaan fasilitas juga mendapat masalah, salah satunya adalah Dinas Pendidikan Kota di Provinsi Jawa Timur mewajibkan bagi guru-guru untuk membeli laptop yang disediakan. Kasus ini ditengarai adanya upaya korupsi dari pejabat Dinas Pendidikan. Tantangan terakhir adalah sumber daya manusia, terutama guru. Masalah guru terletak pada persebaran yang tidak merata dan penempatan yang tidak sesuai dengan spesialisasinya. Melihat kondisi pendidikan nasional saat ini, rasa pesimis akan terwujudnya pendidikan berasaskan kemanusiaan yang dikembangkan Ki Hadjar Dewantara kian meningkat. Tetapi, dengan mengingat kembali sosok beliau setidaknya dapat mengenang, merestorasi idealisme pendidikan sekaligus membangun langkah-langkah kecil dibidangnya masing-masing untuk terwujudnya pendidikan nasional sebagaimana diimpikan Ki Hadjar Dewantara.

Oleh : Lusi Yolanda

Judul: **Tanah Surga Katanya**

Eksekutif Produser : **Deddy Mizwar**

Produser : **Bustal Nawawi**

Sutradara : **Herwin Novianto**

Rilis: **Agustus 2012**

Pemeran :

Osa Aji Santoso, Fuad Idris, Ence Bagus,

Astrid Nurdin, Tissa Biani Azzahra,

Ringgo Agus Rahman, Norman , Akyuwen

Pernahkan terpikir oleh anda hidup di daerah perbatasan yang jauh dari keramaian dan tertinggal dari kemajuan zaman? Jauh dari kata perkembangan pembangunan, perkembangan ekonomi, dan hal lainnya yang biasa menjadi perbincangan sehari hari, bahkan awam terhadap mata uang rupiah? Ya, disanalah Salman dan keluarganya tinggal bersama dengan sebagian Warga Negara Indonesia (WNI) lainnya yang tinggal di daerah terluar pulau Kalimantan, yaitu daerah perbatasan Indonesia dan Serawak (Malaysia).

Salman adalah anak yang pintar dan rajin. Kesehariannya diisi dengan bersekolah dan membantu bekerja kakeknya yang sakit-sakitan. Salman bersekolah di sebuah sekolah yang sangat memprihatinkan, jauh dari kata "layak" untuk disebut sekolah. Sekolah tersebut sudah satu tahun diliburkan karena keterbatasan guru dan ruangan kelas yang tak layak lagi untuk ditempati. Selain itu, disekolah tersebut tidak ada sarana dan prasarana lain seperti layaknya sekolah sekolah pada umumnya, hanya semangat dari murid murid dan masyarakat sekitarnya yang membuat sekolah itu tetap ada.

Salman dan Salina adalah kakak beradik piatu. Mereka tinggal dengan kakek mereka yang merupakan seorang mantan pejuang ketika melawan Malaysia pada Operasi Dwikora. Mereka hidup serba kekurangan, sedangkan sang Ayah Haris lebih memilih pergi dan berdagang di Malaysia.

Kisah perjuangan yang selalu ia dengar dari cerita kakeknya, memupuk rasa kecintaan yang mendalam pada diri Salman terhadap Indonesia, bahkan ia pun menolak ajakan ayahnya untuk pindah menjadi Warga Negara Malaysia. Meski di iming-imingi banyak hal danharus berpisah dengan adiknya Salina yang ia sayangi, Salman memilih untuk tinggal bersama sang kakek yang bersikukuh untuk tidak ingin pindah dari negeri yang dicintainya.

Kehidupan sehari hari Salman pun mulai berubah ketika penyakit yang diderita kakeknya menjadi semakin parah. Keinginannya yang kuat untuk membawa kakeknya ke rumah sakit agar bisa mendapat pengobatan yang layakpun memaksanya untuk bekerja keras mengumpulkan sedikit demi

TANAH SURGA

sedikit uang. Mengantarkan pesanan pakaian dan kerajinan tangan ke Malaysia pun menjadi pekerjaan sampingannya selain bersekolah. Perbedaan kondisi yang jauh antara kampung tempatnya tinggal dan Serawak (Malaysia) cukup membuatnya tercengang-cengang. Keliaran matanya memandangi sekitar membuatnya seakan melihat adiknya Salina yang sudah tak pernah lagi ia temui semenjak ayahnya dan Salina pindah dan menjadi Warga Negara Malaysia. Mereka bahkan hidup jauh lebih baik dan sejahtera dari pada kehidupan mereka sebelumnya di Indonesia.

Ketimpangan keadaan yang ia temui, membuatnya bingung tentang julukan Indonesia sebagai Tanah Surga yang sejahtera dan makmur. Salman pun bertanya kepada gurunya mengapa Indonesia dikatakan "Tanah Surga". Padahal yang ia tahu, mereka disana sehari hari hidup serba susah dan tertinggal. Bahkan, ayahnya dan beberapa Warga Negara Indonesia lainnya memilih pindah dan menjadi Warga Negara Malaysia untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Lebih dari itu, kakeknya tidak bisa berobat karena jauhnya akses ke rumah sakit dan tidak adanya biaya.

Cerita inipun berakhir ketika Salman berada pada puncak kesusahan dan kesedihannya dalam merawat sang kakek.Sementara itu, ayahnya ada di puncak kealpaannya, lupa akan jati dirinya sebagai Bangsa Indonesia, menikmati hidup yang lebih maju dan sejahtera, meskipun sebenarnya bukan kesejahteraan yang sesungguhnya yang didapatkan.

Film ini pada dasarnya menyampaikan cerita yang cukup sederhana yaitu untuk memperlihatkan ironi dari masyarakat perbatasan yang jauh dari perkembangan zaman dan tertinggal, jauh dari sentuhan pemerintah seperti layaknya daerah daerah lainnya, dan berjuang untuk dapat hidup dengan layak dengan berbagai cara, meskipun merelakan kecintaan mereka terhadap tanah airnya.(***)

Film yang diproduseri oleh Deddy Mizwar ini memang sukses menarik perhatian banyak orang, selain karena film ini identik dengan lagu "kolam susu" yang sudah tak asing lagi

TANAH SURGA

di telinga , film ini juga menjadi menarik karena ditengah tengah maraknya film film yang kadang bertema tidak jelas, film yang bertema Nasionalitas ini muncul dan mendapat sambutan baik sehingga memang patut diacungi jempol.

Film ini, selain memberikan pemaparan tentang keadaan dan realita masyarakat di wilayah perbatasan, juga memberikan bentuk sindiran terhadap para pejabat yang lalai, dan tidak melaksanakan tugas dengan baik sepenuhnya, juga teguran untuk pemerintah agar lebih memperhatikan daerah daerah perbatasan yang selama ini terlupakan , serta seolah memberikan refleksi pada masing masing individu diri kita sebagai Bangsa Indonesia, tentang seberapa besar kecintaan kita terhadap Indonesia, dan apa yang dapat kita lakukan untuk Negri ini.

Pada Film ini, pemaparan pesan pesan moralnya pun akan dapat dengan jelas ditangkap oleh para penonton, karena sebagian besar pesan diucapkan oleh para tokoh, seperti kutipan perkataan Hasyim kakeknya Salman, " aku berjuang bukan untuk pemerintah, tapi untuk negri ini", dan "Indonesia adalah tanah surga, apapun yang terjadi pada dirimu, jangan sampai kehilangan cintamu pada negri ini, genggam erat cita citamu, katakan kepada dunia: Kami Bangsa Indonesia".

Seakan sudah menjadi ciri khas film film yang beredar sekarang ini, pada film yang diproduseri Deddy Mizwar yang satu ini, juga terdapat selipan iklan iklan/sponsor, yang terkadang cukup membuat kita jengkel, karena selipan selipan iklan tersebut seolah olah mencemari cerita yang sesungguhnya.

Film ini berhasil meraih banyak kesuksesan, diantaranya, dinobatkan sebagai film bioskop terbaik dalam ajang Festival film Indonesia (FFI) 2012 di Yogyakarta, juga mengantarkan Herwin Novianto, sang sutradaranya menjadi Sutradara Terbaik.

Film yang berdurasi satu setengah jam ini memang tergolong minim konflik, dan kurang fokus terhadap jalan ceritanya, meskipun demikian film ini memberikan pesan moral yang cukup jelas, memberi pengertian kepada penontonnya tentang arti nasionalisme dan kecintaan terhadap Indonesia.

TANAH SURGA

Requim Cinta dan Penyesalan

Oleh Moses Parlindungan Opungsunggu

Suatu kala aku sempoyongan sendirian disini, dan bertanya kepada diri sendiri, apa lacur sehingga tubuh ini begitu terasa miring dan tidak bisa kembali berdiri bagaikan mahkluk yang normal. Satu langkah menuju pintu keluar begitu berat tertempa, merambahlah sakit yang amat kuat itu ke dalam bagian tubuhku yang paling dalam dan tidak tertembus khazanah optik manapun di dunia ini. Memicingkan mata melalui lubang pintu, sedikit mengerang walaupun dapat kulakukan, di luar banyak sekali obyek berjalan yang suaranya begitu samar, sehingga aku menjadi semu serasa terbatas ribuan dimensi saja. Lantas aku kembali meringkuk ke sudut ruang sempit itu, mencari titian terakhir yang mampu menumpu garis kenyataan yang bagiku fana dan menjemukan, sekaligus mencekam. Aku adalah bagian dari tragedi penciptaan, yang senantiasa disenandungkan oleh para pengaduh di sebuah titik kosong dalam jurang maut pemisah strata kehidupan. Aku adalah

bagian dari frase pertanyaan yang timbul melalui upayaku sebagai manusia yang skeptis dan ingin selalu murung. Ketika itu selalu berusaha mengoyak raga dan perasaanku, maka tidak ada salahnya bagiku untuk berdiam di sudut ini, untuk waktu yang tidak sedikit, tergantung bagaimana aku semakin terpinggirkan dari tatanan ini atau tidak.

Sedikit banyak, masalah yang datang dalam hidupku bukanlah sebuah rasio yang pantas, jika kukatakan bahwa hidup yang terasa menekan beban ini tercipta melalui pertemuan berbagai situasi yang tidak dapat kuselesaikan sehingga tuntas. Ketika aku merasa bahwa berada di sini adalah disudutkan oleh kala, maka aku merasa kalah oleh kala yang mencekik gairahku untuk melanjutkan hidup. Ketika aku merasa bahwa untuk melangkahkan kaki sedikit saja menuju udara segar terasa amat berat, maka aku memilih untuk memelas sendirian, dan mencoba mengelus kepalaku sendiri tanpa berterika minta belas kasihan. Jika kuibaratkan bahwa hidup ini adalah sebuat rute tanpa destinasi, maka kala ketika aku memilih untuk tidak berteriak ini adalah perhentian kesekian dari rute tanpa ujung itu. Satu-satunya pengikat yang menjadi traktat bahwa aku tidak boleh tidak untuk mengakhiri rute itu, hanya suatu keinginan untuk kembali merangkul jiwa yang telah lama lenyap dan tak meninggalkan jejak satu cuilpun. Itulah noktah yang teramat keji, sampai-sampai aku tidak mampu lagi untuk sekedar membuang nafas sebagaimana seharusnya terjadi.

Apakah itu dia, noktah keji yang dulu begitu nyaman untuk menyandarkan segala keluh kesah? Dari balik bilik sempit ini hanya terdengar pertemuan banyak suara yang mencapai desibel tertentu, sehingga telingaku hanya menangkap bungkus luarnya saja. Bahkan suara nafas panjang yang terus-menerus kuhela agar dapat bertahan hidup begitu pelan kudengar, tertindih kuatnya medio-medio utopis yang mencela di luar sana. Sangkaku adalah aku yang dihadapkan dalam untaian ingatan yang mungkin lama menjelma menjadi setan pengeruk gairah untuk melanjutkan hidup. Setan itu berdiang di mana saja, namun begitu semaunya ketika menyerang sisi paling cerah yang

pernah terbangun dalam hidupku, memaksa aku untuk turut dalam sebuah penyembahan akan kesedihan dan ratapan yang membelenggu. Setan itu begitu kejam, aku semakin ingin berbicara kepada angin, pertama aku hanya ingin meminta kejelasan, kemana aku dibawa terombang-ambing tanpa arah dan musabab yang pasti? Kedua, semua yang telah hilang meninggalkan wujud manusiaku akankah kembali pulang dan mengisi ceruk-ceruk kosong yang amblas walaupun tidak terkena rentetan tangisan langit yang begitu gemulai?

Bahkan rona yang timbul dari nuansa yang terlihat disini hanyalah semacam kesengsaraan, pasti menjerat semua asa untuk membalut pilar perasaan yang sudah terluka. Memori yang kusut, semacam tali temali yang berjuntai tanpa pretensi, tersangkut beban yang tiada terlihat jelas namun terasa menggelisahkan. Setelah banyak hari yang kulewatkan, untuk mencoba mencari tumpuan dalam berpikir dan berkehendak, aku merasa bahwa semua usaha yang telah ada itu berakhir dalam meja potong sengsara yang sewaktu-waktu dapat menikam setiap lini dalam tubuhku yang telah seluruhnya meluruh dalam kesedihan. Satu-satunya yang menjadi gairah, stimulan bagi kejatuhan diri yang terancam semakin pupus, adalah nada-nada lama yang terekam jelas, tanpa peduli bahwa memori yang terjalin dalam otakku sudah begitu berantakan. Penjelasan yang kudapat melalui nostalgi menyedihkan ini, adalah aku tidak bisa lepas dari bayangan yang lama mengekang laju darahku, langkah kakiku menuju deraian kebahagiaan, dan bergerak mundur menuju kehampaan yang nyata.

Aku teringat lagi, dengan sapaan halus yang begitu indah, yang terindah yang pernah dibisikkan kepada telinga. Dengan keteduhan yang melingkupi setiap lambaian tangan perpisahan, dan senyum terukir begitu jelas bersama dengan haru biru penuh cinta. Dengan pelukan yang begitu erat, lembut menggiring aku menuju puncak perasaan bahagia, membubung tinggi, melewati garis batas yang terlihat oleh mata. Dengan jalinan kata-kata yang menjadi impian, akan kehidupan bersama yang penuh harmoni indah. Semua itu hilang dalam sedetik. Melalui

hari yang selama ini terekam sebagai sebuah kegelapan yang terngiang-ngiang, mungkin untuk selamanya. Bahkan di saat aku mencoba lagi menjadi manusia yang utuh, bilur-bilur yang telah hilang itu terasa mustahil untuk kutemukan lagi. Menjadi satu dengan buih air laut yang tercampur dengan kegelapan di tengah samudera lepas.

Bahwa aku selalu merindukanmu, aku mengakuinya.

Bahwa aku selalu merasakan dirimu ada dan memelukku, aku mengakuinya.

Bahwa aku selalu menyayangimu, aku berharap kamu mengerti dan tahu.

Aku selalu menjadi orang yang paling mencintaimu, kemarin, kini dan sepanjang aku masih bisa merasakan kehidupan sebagai jiwa yang utuh.

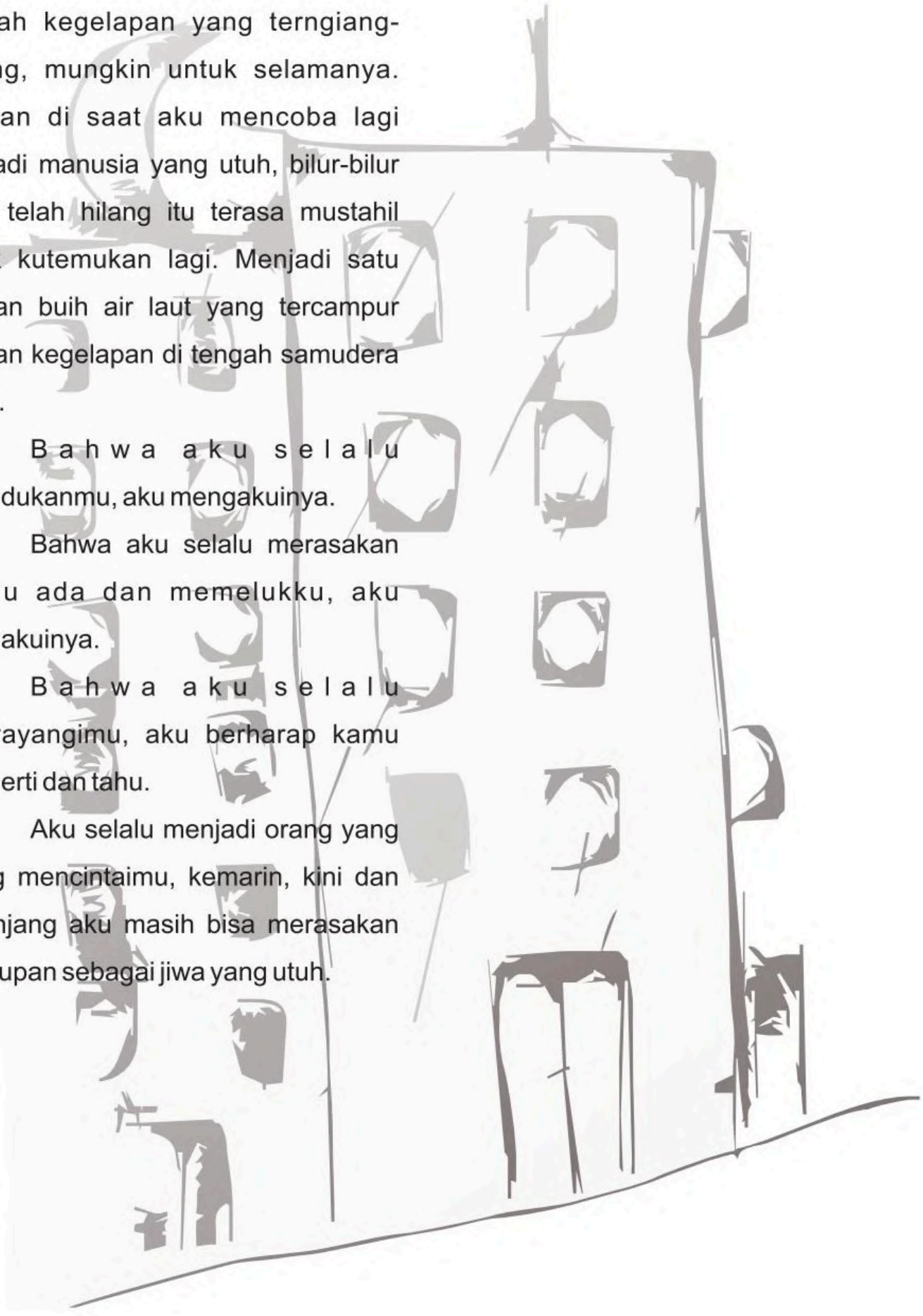

"JIKA AKU MENULIS DILARANG, AKU AKAN MENULIS DENGAN TETES DARAH!"
– WIJI THUKUL

Badan Penerbitan dan Pers Mahasiswa
mahkamah
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

menulis

Karena kau menulis. Suaramu takkan padam ditelan angin, akan abadi, sampai jauh, jauh di kemudian hari. (Pram)